



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Baru No. 01 Telp (0913) 21551 Namlea – Jiku Kecil

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
Nomor : 420.1 / 422 / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SRI REJEKI 2
DESA WAEPURE KECAMATAN AIRBUAYA
PADA YAYASAN QATHRU AL-SYAFIQ KABUPATEN BURU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pendidikan.

b. bahwa untuk dimaksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak (TK) Sri Rejeki 2 Desa Waepure Kecamatan Airbuaya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 121).

Memperhatikan : Surat Pengusulan Yayasan Qathru Al-Syafiq tentang Pemohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sri Rejeki 2 Desa Waepure Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Nomor : 011/ YQA/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Sri Rejeki 2 Desa Waepure Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru,

Kedua : Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Sri Rejeki 2 Desa Waepure Kecamatan Airbuaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Keliga : Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Penyelenggara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku Tahun Pelajaran 2013/2014.

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : **25 April 2014**

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru



Drs A. MUKADDAR

Pembina Tk.I

Np. 17570927 1986021 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku Cq. Bidang PLS di Ambon
3. Bupati Buru di Namlea
4. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buru
Di Namlea
6. Camat Airbuaya Di Airbuaya
7. Kepala UPTD Kec. Airbuaya
8. Arslp